

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan adalah problem yang hingga kini masih menjadi permasalahan pemerintah diberbagai wilayah utamanya dinegara yang sedang berkembang dan negara miskin. Kemiskinan dijadikan sebagai fokus utama pemerintah dalam proses pembangunan ekonomi, dikarenakan akibat dari kemiskinan akan mempengaruhi berbagai bidang dalam kehidupan.¹ Kebijakan yang dibuat pemerintah tidak mampu menjadi solusi dari permasalahan kemiskinan sehingga kejahatan marak terjadi ditengah-tengah kehidupan hal tersebut merupakan salah satu akibat dari kemiskinan.²

Wilayah Asia Tenggara merupakan kawasan yang mencakup 11 negara berkembang diantaranya Indonesia, Laos, Thailand, Myanmar, Brunei Darussalam, Kamboja, Vietnam, Filipina, Timor Leste, Malaysia dan hanya satu negara yang tergolong negara maju yakni Singapura. Negara berkembang memiliki beberapa karakteristik yang dapat dijadikan ciri utamanya yaitu jumlah penduduk yang padat dengan tingkat pemasukan rendah, taraf pendidikan dan mutu sumber daya manusia rendah, tingkat pendapatan perkapita rendah hanya sekitar US\$300 pertahun, mayoritas mata pencaharian petani dan hanya sebagian kecil yang berada di industri, mesin produksi jumlahnya masih rendah, dan sebagiannya merupakan negara yang baru diproklamasikan kemerdekaanya.³ Berikut ini data yang dirilis oleh *index mundi* mengenai persentase kemiskinan di Kawasan Asia Tenggara pada tahun 2020.

Tabel 1.1
Kemiskinan Di Negara Asia Tenggara Tahun 2020

Negara Asia Tenggara	Angka Kemiskinan (%)	Populasi Penduduk (Jiwa)
Indonesia	10,9	267.026.400

¹ Dudi Septiadi and Muhammad Nursan, "Pengentasan Kemiskinan Indonesia: Analisis Indikator Makroekonomi Dan Kebijakan Pertanian," *Jurnal Hexagro* 4, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.36423/hexagro.v4i1.371>.

² Bayu Tri Cahya, "Kemiskinan Ditinjau Dari Perpekstif Al-Quran Dan Hadis," *Jurnal Penelitian* 9, no. 1 (2015): 41–66, <https://doi.org/10.21043/jupe.v9i1.850>.

³ Beni Kurniawan, *PEREKONOMIAN INDONESIA* (Tangerang: Al Fath Zumar, 2014), 95–96.

Laos	22	7.477.396
Thailand	7,2	68.977.400
Myanmar	25,6	56.590.070
Singapura	0,9	6.209.660
Brunei Darusalam	0,1	464.478
Malaysia	3,8	32.652.080
Vietnam	8	98.721.270
Filipina	21,6	109.180.800
Timor Leste	41,8	1.383.723
Kamboja	16,5	16.926.980

Sumber: index mundi

Problem kemiskinan ialah problem nasional yang hingga kini masih diupayakan guna pengentasannya.⁴ Kemiskinan secara umum merupakan suatu keadaan ketidakmampuan untuk memenuhi setiap aspek kehidupan.⁵ Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan merupakan kondisi ketimpangan atau kesenjangan distribusi yang diakibatkan oleh belum meratanya kebijakan pembangunan menyeluruh kepada seluruh masyarakat.⁶ Kemiskinan juga dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakcukupan/kekurangan hak akan aset dan peluang penting.⁷

Kemiskinan dapat diidentifikasi dengan adanya pengangguran, keterbelakangan hingga keterpurukan. Program pengentasan kemiskinan haruslah dijadikan sebagai prioritas utama dalam suatu negara, karena kemiskinan dapat berakibat terhambatnya pencapaian pembangunan, pemerataan dan demokrasi ekonomi suatu wilayah.⁸ Kemiskinan dapat ditandai berdasarkan tingkat pendapatan seseorang untuk memenuhi kebutuhan. Garis kemiskinan merupakan

⁴ Dita Wahyu Puspita, "Analisis Determinan Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah," *Jejak* 8, no. 1 (2015): 100–107, <https://doi.org/10.15294/jejak.v8i1.3858>.

⁵ farathika putri Utami, "Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia(IPM) , Kemiskinan Dan Pengangguran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Aceh," *Jurnal Samudra Ekonomika* 4, no. 2 (2020): 101–13, <https://ejournalunsam.id/index.php/jse/article/view/2303>.

⁶ Badan Pusat Statistik, *Indikator Kemiskinan* (Makassar, 2008).

⁷ Yoserizal, *Indeks Kemiskinan Manusia* (Pekanbaru: ALAF RIAU, 2015), 18.

⁸ Rahardjo Adisasmita, *DASAR-DASAR EKONOMI WILAYAH Edisi 2* (Yogyakarta: Expert, 2018), 163.

pembatas antara keadaan miskin atau biasa yang didasarkan dengan tingkat pendapatan minimum.⁹

Badan Pusat Statistik Indonesia mempublikasikan data kemiskinan Indonesia periode tahun 2020-2022 dengan hasil sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Data Kemiskinan Indonesia Tahun 2020-2022

Tahun	2020	2021	2022
Persentase Kemiskinan (%)	10,19	9,71	9,57
Indeks Keparahan Kemiskinan (%)	0,47	0,42	0,38
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	27.550	24.786	26.363
Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	458.946	486.168	513.170

Sumber: Badan Pusat Statistik

Provinsi di Indonesia hampir seluruhnya dilanda kemiskinan dengan jumlah penduduk miskin dan garis kemiskinan yang berbeda di tiap wilayah. Badan Pusat Statistik (BPS) mempublikasikan data provinsi dengan total penduduk miskin terbanyak di Indonesia merupakan provinsi Jawa Timur lalu disusul dengan provinsi Jawa Tengah sehingga Jawa Tengah merupakan provinsi kedua di Indonesia dengan total penduduk miskin terbanyak. Penduduk miskin di Jawa Tengah pada tahun 2020 mencapai 3,7 juta jiwa sedangkan jumlah populasi penduduk di Jawa Tengah sebanyak 34 juta jiwa, hal demikian menandakan bahwa lebih dari 10% dari populasi penduduk di Jawa Tengah merupakan penduduk miskin dan berada di bawah garis kemiskinan. Hal tersebut haruslah menjadikan masalah kemiskinan sebagai masalah yang serius dan perlu diupayakan dalam pengentasannya bagi pemerintah wilayah Jawa Tengah.

Tabel 1.3
Kemiskinan Di Pulau Jawa Tahun 2020-2022

Tahun	Provinsi	Persentase Kemiskinan (%)	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)
2020	DKI Jakarta	4,69	496,8
	Jawa Barat	8,43	4.188,5

⁹ Sudirman Sudirman and Lili Andriani, "Pengaruh Upah Minimum Dan Inflasi Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Provinsi Jambi," *EKONOMIS : Journal of Economics and Business* 1, no. 1 (2017): 148, <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v1i1.15>.

	Jawa Tengah	11,84	4.119,9
	Yogyakarta	12,80	503,1
	Jawa Timur	11,46	4.586
2021	DKI Jakarta	4,67	498,3
	Jawa Barat	7,97	4.004,9
	Jawa Tengah	11,25	3.934
	Yogyakarta	11,91	474,5
	Jawa Timur	10,59	4.259,6
2022	DKI Jakarta	4,61	494,93
	Jawa Barat	7,98	4.053,6
	Jawa Tengah	10,98	3.858,2
	Yogyakarta	11,49	463,63
	Jawa Timur	10,49	4.236,51

Sumber: Badan Pusat Statistik

Beracuan pada tabel 1.3 dapat disimpulkan bahwa selama periode tahun 2020-2022 provinsi kedua dengan tingkat persentase tertinggi di pulau Jawa merupakan provinsi Jawa Tengah. Tahun 2020 persentase kemiskinan di Jawa Tengah melonjak hingga sebesar 11,84% namun seiring bertambahnya waktu mengalami sedikit penurunan sebesar 11,25% pada tahun 2021 dan mencapai angka 10,98% pada tahun 2022. Dengan kata lain provinsi Jawa Tengah masih belum dapat sepenuhnya meminimalisir tingkat kemiskinannya dan menanggulangi masalah kemiskinan. Hal tersebut juga terlihat pada laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang pertumbuhannya masih lambat.

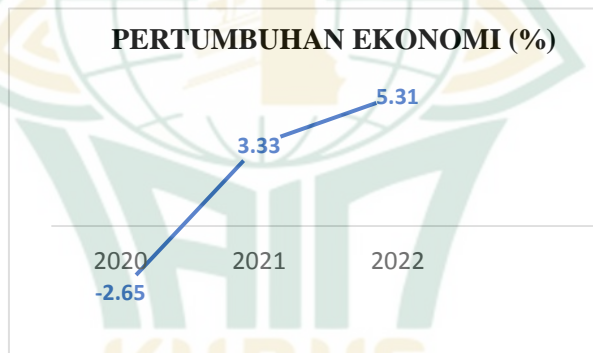
Dalam melihat keberhasilan pembangunan negara, indikator yang dapat digunakan ialah kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi. Setiap negara memiliki strategi dan kebijakan untuk mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi serta menekan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi dapat dijadikan sebagai salah satu syarat utama dalam menekan angka kemiskinan. Namun dalam mencapai pertumbuhan ekonomi di dalam negara berkembang juga sering

diiringi permasalahan lain seperti naiknya jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan.¹⁰

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Hardinandar, tercapainya pertumbuhan ekonomi dalam wilayah secara umum berdasarkan tingkat Produk Domestik Bruto (PDB) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).¹¹ Naiknya PDB suatu daerah meskipun kenaikannya lebih kecil maupun lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk pada periode tertentu disebut pertumbuhan ekonomi.¹²

Parameter yang dapat dipakai guna mengukur pertumbuhan ekonomi pada jangkauan wilayah tertentu merupakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan.¹³ Berikut ini merupakan data PDRB Jawa Tengah dari tahun 2020-2022:

Grafik 1.1
Produk Domestik Regional Bruto Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2020-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

¹⁰ N. Gregori Mankiw, *Teori Makro Ekonomi* (Jakarta: Gelora Aksara Pratama, 2007), 72.

¹¹ Fajrin Hardinandar, “Determinan Kemiskinan (Studi Kasus 29 Kota/Kabupaten Di Provinsi Papua),” *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)* 4, no. 1 (2019): 1–12.

¹² Suwandi, *Desentralisasi Fiskal Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Penyerapan Tenaga Kerja, Kemiskinan, Dan Kesejahteraan Di Kabupaten/Kota Induk Provinsi Papua* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2015), 89.

¹³ Nursiah Chalid and Yusbar Yusuf, “Pengaruh Tingkat Kemiskinan Dan Tingkat Pengangguran, Upah Minimum Kabupaten/Kota Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Riau,” *Jurnal Ekonomi* 22, no. 2 (2014): 1–12, <http://ejournal.unri.ac.id/index.php/JE/article/viewFile/2592/2547%0A>.

Grafik 1.1 menunjukkan nilai pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah tahun 2020 hingga 2022 berdasarkan hasil PDRB atas dasar harga konstan 2010. Pada Grafik tersebut menunjukkan nilai terendah pada periode tersebut terjadi pada tahun 2020 yakni sebesar -2,65%.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Anindya Erma Widowati, Whinarko Juli Prianto dan Rian Destiningsih menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi kemiskinan.¹⁴ Hasil tersebut berbanding terbalik dengan hasil penelitian Mifaqh Nur Faritz dan Ady Soejoto yang menunjukkan jika variabel kenaikan ekonomi berpengaruh signifikan negatif pada kemiskinan.¹⁵

Makmur tidaknya individu sering dihubungkan dengan tingkat pemasukan yang mereka miliki. Pendapatan atau upah masyarakat dapat maksimum jika pemanfaatan penuh tenaga kerja mampu dicapai. Bertambahnya kebutuhan hidup yang harus terpenuhi oleh pekerja dan keluarga, berimbas terhadap persoalan upah atau pendapatan. Polemik mengenai persoalan upah sampai saat ini masih belum ditemukan solusinya. Multipersepsi atau perbedaan pendapat antara pekerja, pengusaha dan pemerintah mengenai upah dianggap sebagai penyebabnya.

Upah merupakan hak atas jasa yang telah dilakukan seseorang yang diterima sesuai kesepakatan atau kontrak kerja kedua belah pihak.¹⁶ Kesejahteraan akan ikut berkurang apabila upah yang didapatkan tidak mencukupi kebutuhan hidup seseorang sehingga akan berakibat pada kemiskinan.¹⁷ Upah minimum merupakan upah pokok minimum termasuk tunjangan dalam satu bulan yang besarnya ditetapkan oleh gubernur yang dapat digunakan sebagai jaring

¹⁴ Anindya Erma Widowati, Whinarko Juli Prijanto, and Rian Destiningsih, "PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGANGGURAN DAN JUMLAH PENDUDUK TERHADAP KEMISKINAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2001-2018," *Journal of Economic* 2, no. 1 (2018).

¹⁵ Mifaqh Nur Faritz and Ady Soejoto, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Rata-Rata Lama Sekolah Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah," *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)* 8, no. 1 (2020): 15–21, <https://doi.org/10.26740/jupe.v8n1.p15-21>.

¹⁶ Dalinama Telaumbanua, *HUKUM KETENAGAKERJAAN* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2019), 25.

¹⁷ Erliza Millenia and Dewi Zaini, "Ecosains : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan Pengaruh Upah Minimum , Tingkat Pengangguran Terbuka , Pendidikan Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Kemiskinan Di" 10, no. November (2021): 106–14.

pengaman.¹⁸ Penetapan tersebut bertujuan agar terpenuhinya standart hidup minimum seperti efisiensi dan kesejahteraan tenaga kerja, dan kesehatan. Upah minimum yang semakin tinggi maka akan ikut tinggi pula kesejahteraan masyarakat sehingga angka kemiskinan dapat ditekan.¹⁹

Menurut data Badan Pusat Statistik, upah minimum provinsi Jawa Tengah pada tahun 2020 senilai Rp. 1.742.015 lalu bertambah menjadi Rp. 1.798.979 pada tahun 2021 dan senilai Rp. 1.812.935 pada tahun 2022. Berdasarkan data tersebut, setiap tahunnya pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berupaya meningkatkan jumlah upah minimum setiap tahunnya. Selain itu program kenaikan upah minimum juga didasarkan atas kebijakan pemerintah daerah guna memicu minat masyarakat dalam bekerja serta dikarenakan kebutuhan hidup yang semakin meningkat sehingga diperlukan adanya peningkatan tingkat upah.

Yulia Adella Sari dalam penelitiannya menunjukkan jika upah minimum berpengaruh secara negatif pada kemiskinan.²⁰ Sejalan dengan riset yang telah dilakukan Ria Safitri, Jadzil Baihaqi dan Supriyadi bahwa upah minimum berpengaruh secara negatif pada kemiskinan.²¹

Permasalahan mengenai pengangguran juga menjadi salah satu problem yang masih dialami diberbagai wilayah berkembang terutama di Indonesia. Semakin besar tingkat pengangguran suatu negara maka mencerminkan kurang berhasilnya pembangunan ekonomi di negara tersebut. Rendahnya pengeluaran agregat, penggunaan alat produksi modern sehingga mengurangi tenaga kerja

¹⁸ Dalinama Telaumbanua, *HUKUM KETENAGAKERJAAN*, 2019, 35.

¹⁹ Yunie Rahayu, "PENGARUH UPAH DAN TINGKAT PENDIDIKAN TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI JAMBI Tahun 2010-2019," *Journal Development* 8, no. 2 (2020): 114–28, <https://doi.org/10.53978/jd.v8i2.155>.

²⁰ Yulia Adella Sari, "Pengaruh Upah Minimum Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Jumlah Penduduk Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah," *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi* 10, no. 2 (2021): 121–30, <https://doi.org/10.35906/je001.v10i2.785>.

²¹ Ria Safitri, Jadzil Baihaqi, and S. Supriyadi, "Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Dan Pembangunan Manusia Berbasis Maqashid Syariah Terhadap Jumlah Kemiskinan Di Kabupaten Grobogan Jawa Tengah," *Iqtishoduna* 16, no. 1 (2020): 39–58, <https://doi.org/10.18860/iq.v16i1.7498>.

dan keinginan untuk mencari pekerjaan yang lebih layak merupakan faktor yang dapat menimbulkan pengangguran.²²

Pengangguran secara general dapat didefinisikan suatu kondisi tidak digunakannya tenaga kerja.²³ Indikator yang dipakai guna mengetahui keberhasilan program pengentasan pengangguran yakni TPT (tingkat pengangguran terbuka).²⁴

Akibat dari kesempatan kerja yang rendah dan tidak seimbang dengan total angkatan kerja pertahunnya maka akan menimbulkan pengangguran terbuka.²⁵ Populasi penduduk yang tinggi menjadikan Jawa Tengah memiliki tingkat pengangguran yang cukup tinggi pula. Berikut ini data kependudukan di Jawa Tengah periode 2020-2022 disajikan berikut ini:

Tabel 1.4
Data Ketenagakerjaan Jawa Tengah Tahun 2020-2022

Tahun	2020	2021	2022
Persentase Pengangguran (%)	6,48	5,95	5,57
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	69,43	69,58	70,84
Jumlah Angkatan Kerja (Ribuan Jiwa)	18.751,3	18.964	19.475

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah

Tabel 1.4 diatas disimpulkan jika pengangguran di Jawa Tengah masih terbilang cukup tinggi karena ketidakseimbangan antara populasi penduduk dengan peluang kerja yang tersedia. Berdasarkan penelitian oleh Aria Bashwara Mohammad Bintang dan Nenik Woyanti menyatakan bahwa jika pengangguran berpengaruh positif pada kemiskinan.²⁶ Relevan dengan hasil penelitian Robby Achsyansyah Ishak, Junaidi Zakaria dan M. Arifin bahwa pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan.²⁷

²² Lestari Sukarniati, *EKONOMI SUMBER DAYA MANUSIA* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2019), 119.

²³ Ali Ibrahim Hasyim, *EKONOMI MAKRO* (Jakarta: Kencana, 2016), 198.

²⁴ Rizky Agung Kurniawan, "Pengaruh Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Kota Surabaya," *Jupe* 6, no. 2 (2018): 103–9, <https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/jupe/article/view/24777>.

²⁵ Agoes Parera, *Pengantar Ilmu Ekonomi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2020), 120.

²⁶ Aria Bhaswara Mohammad Bintang and Nenik Woyanti, "Pengaruh PDRB, Pendidikan, Kesehatan, Dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah (2011-2015)," *Media Ekonomi Dan Manajemen* 33, no. 1 (2018): 20–28, <https://doi.org/10.24856/mem.v33i1.563>.

²⁷ Robby Achsyansyah Ishak, Junaidin Zakaria, and M Arifin, "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Tingkat

Provinsi Jawa Tengah merupakan wilayah yang menarik guna diteliti masalah kemiskinan dari sisi kenaikan ekonomi, upah minimum dan tingkat pengangguran. Hal tersebut dikarenakan upah minimum yang ditetapkan pemerintah terbilang cukup rendah dengan biaya hidup dimasa sekarang yang semakin tinggi sehingga menyebabkan kemiskinan, selain itu pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi kesempatan kerja sehingga berkaitan dengan penyebab pengangguran. Selain itu berdasarkan data yang dirilis oleh badan pusat statistik wilayah Jawa tengah termasuk dalam daftar Provinsi yang memiliki total masyarakat miskin dan pesentase kemiskinan terbanyak urutan kedua di Indonesia.

Berdasarkan data yang disajikan, maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Tingkat Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2020-2022”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai bahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2020-2022?
2. Apakah upah minimum berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2020-2022?
3. Apakah tingkat pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2020-2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2020-2022.
2. Untuk mengetahui apakah upah minimum berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2020-2022.
3. Untuk mengetahui apakah tingkat pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2020-2022.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik bagi peneliti maupun pihak lain yang membutuhkan. Manfaat dalam penelitian ini diuraikan berikut ini:

1. Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan wawasan bagi peneliti sendiri dan pembaca terkait pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian kedepannya terkait permasalahan pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan.
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi wawasan pada sektor ekonomi.

E. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun suatu penelitian diperlukan sistematika dalam penulisannya agar dapat menjadi gambaran dari bahasan serta riset penelitian sehingga pembaca akan dengan mudah memahami. Untuk itu sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagian Awal

Pada bagian ini berisi mengenai halaman sampul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman nota pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstrak, halaman daftar isi dan daftar tabel.

2. Bagian Isi

Dalam bagian kedua ini berisi garis besar mengenai bab I hingga bab V, secara rinci bab tersebut berisikan hal berikut ini:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat: latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika atau susunan penulisan penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab dua meliputi uraian dari deskripsi teori dan tinjauan pustaka mengenai topik penelitian yaitu kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, upah minimum, tingkat pengangguran, penelitian terdahulu, kerangka berpikir serta hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab tiga berisi uraian mengenai: jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, populasi

dan sampel, identifikasi variabel dan definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab empat memuat uraian gambaran umum obyek kajian, deskripsi data, analisis data dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Bab lima memuat kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran.

3. Bagian Akhir

Bagian terakhir pada penelitian ini mencakup daftar pustaka serta berbagai lampiran.

